



Tantangan & Peluang Administrasi Perpajakan Indonesia dalam menyambut ASEAN Economic Community

Prof. Dr. P.M. John L. Hutagaol

Disampaikan Pada Seminar Nasional Antisipasi Sektor Perdagangan dalam Menyambut AEC 2015

Direktorat Peraturan Perpajakan II
Direktorat Jenderal Pajak



Agenda

ASEAN Community

- Latar Belakang
- Geography & Demography
- Indikator Ekonomi

1

Profil Perpajakan ASEAN

- Keberagaman sistem perpajakan: kebijakan & administrasi
- Incentif fiskal
- gap kemapanan otoritas perpajakan

2

Isu & Pembahasan

- Tantangan
 - unifikasi sistem
 - harmful tax competition
 - double tax & double non-tax
- Peluang & Keunggulan
 - certainty of (Indonesian) tax regulation
 - optimalisasi instrumen kerjasama perpajakan internasional: Pertukaran Informasi & anti-BEPS
 - posisi tawar pemerintah yang tinggi & kemapanan administrasi perpajakan

3

Simpulan & Langkah ke Depan

4



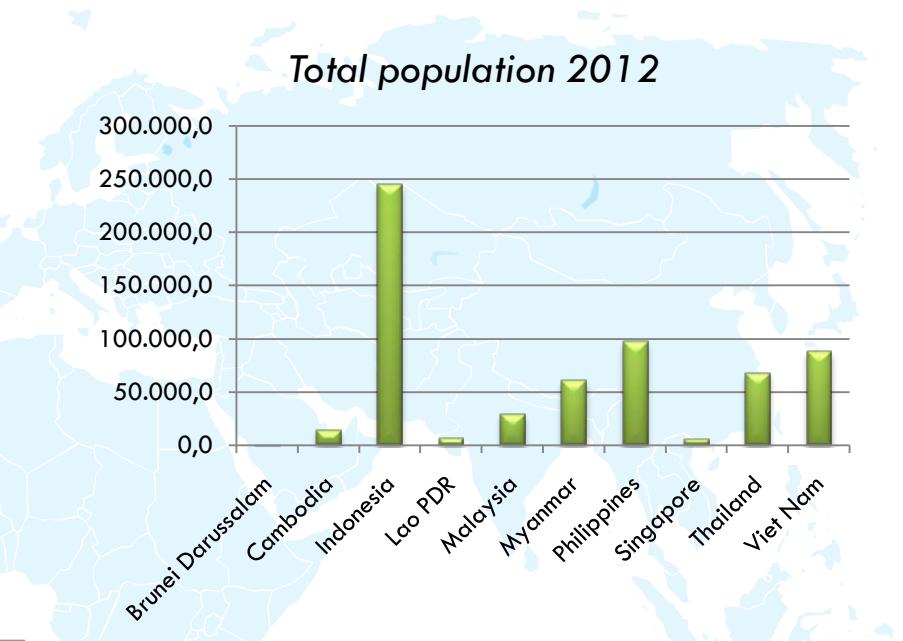
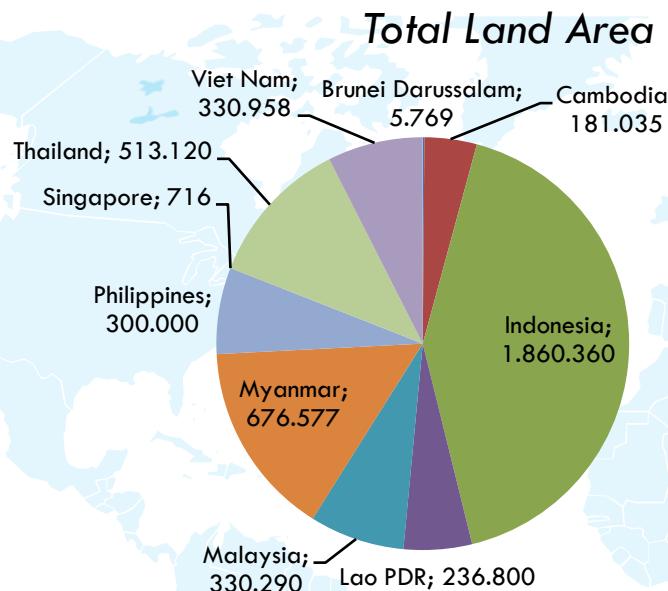
Background

1. 2003 -- Para pimpinan negara ASEAN sepakat membentuk ASEAN Community pada tahun 2020.
2. 2007-- para pemimpin negara ASEAN membuat komitmen percepatan pembentukan komunitas tersebut pada tahun 2015.
3. ASEAN Community terdiri dari 3 pilar kerjasama, yaitu keamanan politik, ekonomi dan sosial budaya.
4. 1 Januari 2010, ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand) meniadakan 99.65% bea impor.
5. Per 31 Desember 2015 negara ASEAN lainnya (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam) akan mengikuti secara penuh peniadaan hambatan tarif.



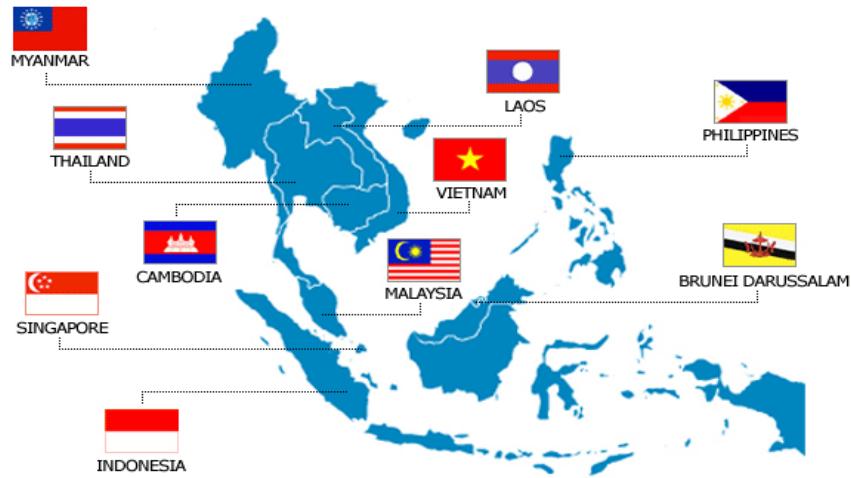


Land Area and Population



Country	Total land area	Total population
	km²	thousand
	2012	2012
Brunei Darussalam	5.769	399,8
Cambodia	181.035	14.741,4
Indonesia	1.860.360	244.775,8
Lao PDR	236.800	6.514,4
Malaysia	330.290	29.518,0
Myanmar	676.577	60.994,1
Philippines	300.000	97.690,9
Singapore	716	5.312,4
Thailand	513.120	67.912,0
Viet Nam	330.958	88.772,9
ASEAN	4.435.624	616.631,8

Source: ASEANStat 2013

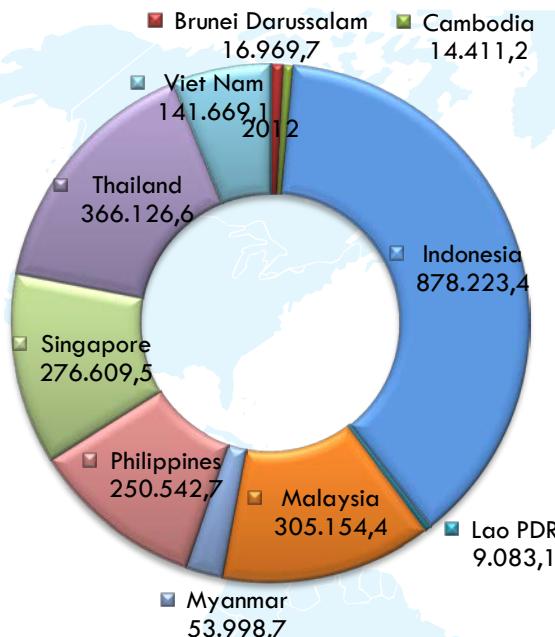




GDP and Income Per Capital

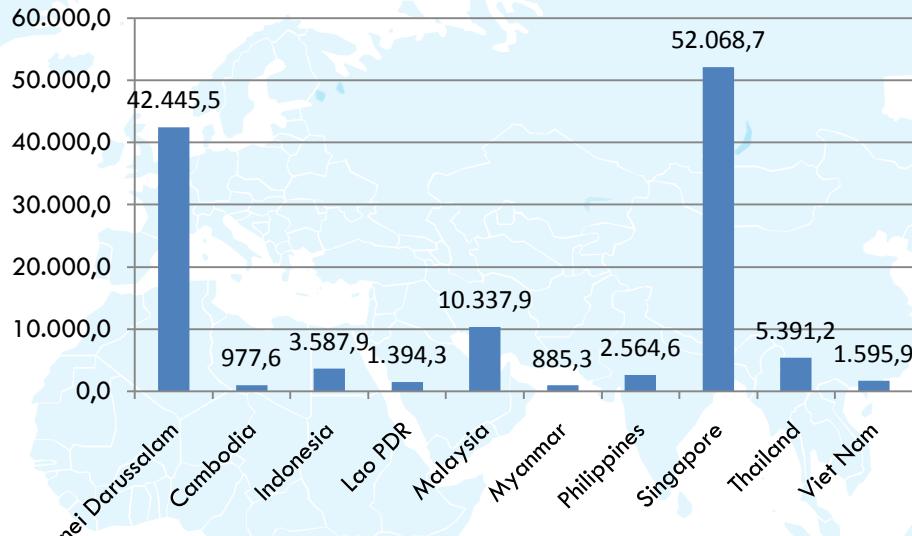
Gross Domestic Product 2012

at current prices US\$ million



GDP Per Capita 2012

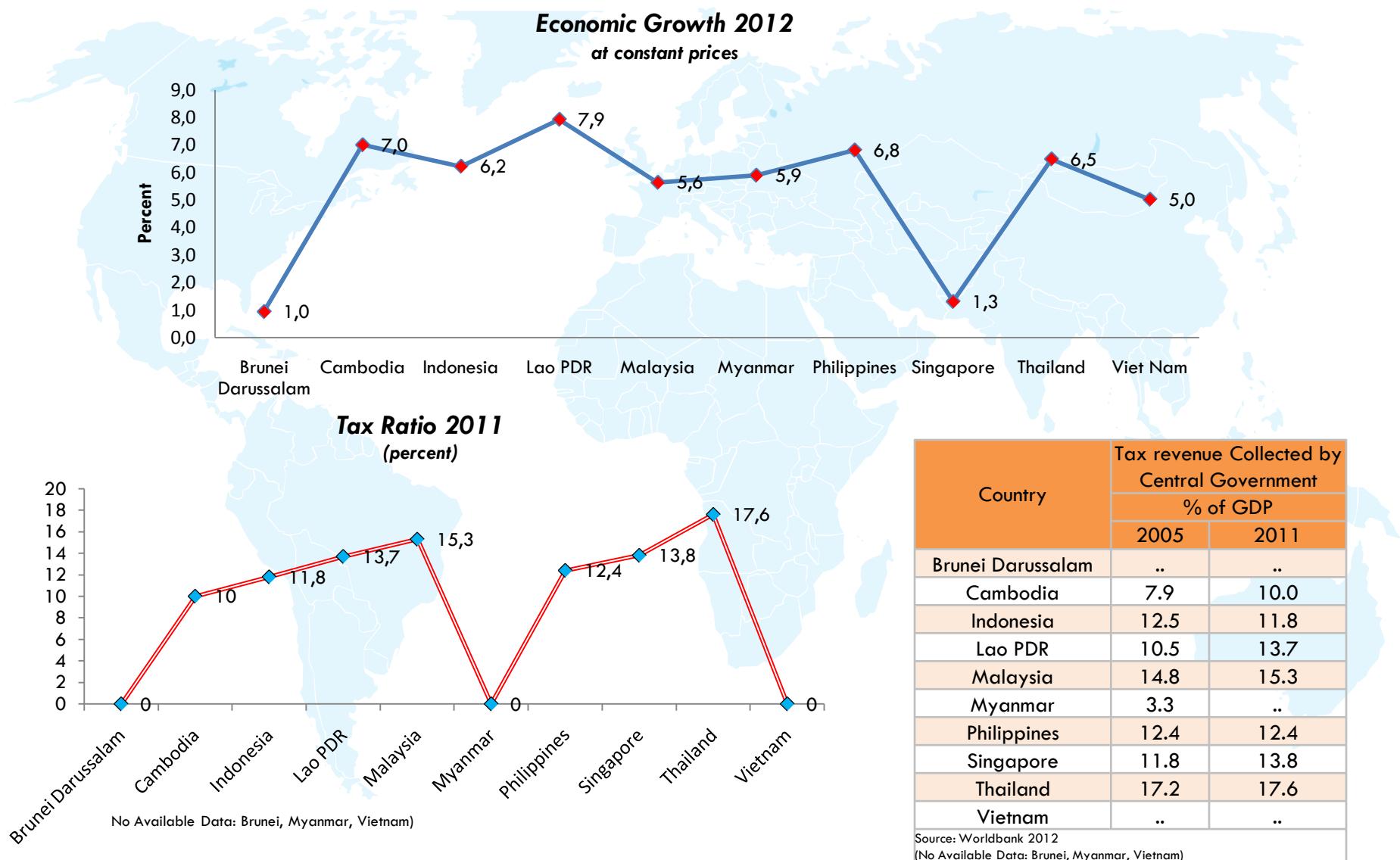
US\$



Country	Gross Domestic Product at current prices US\$ million 2012	Gross Domestic Product per capita at current prices US\$ 2012	
		ASEAN Total	3.750,7
Brunei Darussalam	16.969,7	42.445,5	
Cambodia	14.411,2	977,6	
Indonesia	878.223,4	3.587,9	
Lao PDR	9.083,1	1.394,3	
Malaysia	305.154,4	10.337,9	
Myanmar	53.998,7	885,3	
Philippines	250.542,7	2.564,6	
Singapore	276.609,5	52.068,7	
Thailand	366.126,6	5.391,2	
Viet Nam	141.669,1	1.595,9	
ASEAN Total	2.312.788,5	3.750,7	



Economic Growth and Tax Ratio





ASEAN Countries Tax Profile

Country	Tax System	CIT	Consumption Tax		Investment Incentives	DTA network
Indonesia	Worldwide Income	25%	VAT at 10%	on Supply of Goods/Services and Import	a. Tax Holiday on certain sectors b. reduction of taxable income up to 30% c. accelerated depreciation d. extended loss carry-forward e. reduction WHT on dividends	64 countries
Singapore	Source Income/ Territorial Income	18%	VAT at 7%	on Supply of Goods/Services and Import	a. Tax Holiday b. Reduced tax rates c. Tax Deduction on R&D, IP etc.	71 countries
Malaysia	Worldwide Income	25%	Sales and service tax at 5%, 20% or 25%	on Goods and Services	a. Tax Holiday b. reduced tax rates c. accelerated depreciation d. special deductions	73 countries
Thailand	Worldwide Income	20%	VAT at 7%	on Supply of Goods/Services and Import	a. Tax Exemption/holiday b. reduced tax rates c. tax-exempt dividends	56 countries
Philippines	Worldwide Income	30%	VAT at 12%	on Supply of Goods/Services and Import	a. Tax Holiday b. Reduced tax rates	37 countries
Vietnam		25%	VAT at 5% and 10%	on Supply of Goods/Services and Import	a. Tax Holiday b. Reduced tax rates c. Preferential tax rates	58 countries
Brunei Darussalam	Worldwide Income	20%	no VAT		a. Tax Exemption/holiday on pioneer industry b. Tax relief on capital expenditure c. WHT exemption on interest of certain loan d. Tax relief on R&D expenditure	13 countries
Cambodia	Worldwide Income	20%	VAT at 10%	on Supply of Goods/Services and Import	a. Tax Exemption b. Accelerated Depreciation	no tax treaties
Laos		24%	VAT at 10%	on Goods and Import	a. Reduced tax rates b. extended loss carry-forward	7 countries
Myanmar	Worldwide Income	25%	comercial/sales tax at 5%	on gross sales	a. Tax Holiday/exemptions b. Reduction of income tax up to 50% c. Tax Deduction on R&D expenditure d. Accelerated Depreciation	8 countries



Issues of Discussion -Challenges-

Upaya unifikasi sistem perpajakan

- perbedaan kebijakan ekonomi dan *nature of business* di masing-masing negara anggota, misal: fokus pada sektor ‘jasa’ atau ‘industri’ atau ‘perdagangan’
- penyeragaman tarif PPh
 - corporate rate?
 - withholding tax?
 - bea dan cukai?
- dalam upaya menarik investasi, negara berlomba memberi insentif
 - hampir semua negara ASEAN memiliki rejim *tax holiday*
 - selain *tax holiday*, pengurangan tarif untuk sektor tertentu jamak dilakukan
 - kecenderungan “race to zero (tax)” dapat menjadi peluang upaya ‘*profit shifting*’
- perlu standarisasi regional dalam pemberian insentif?

Upaya mencegah double tax

- selain kepentingan ekonomi, perlu kemauan secara politik untuk membentuk *tax treaty* sebagai upaya efektif mencegah *double tax*
- faktanya, belum semua negara ASEAN memiliki *tax treaty* satu sama lain
- Kamboja, bahkan belum memiliki kebijakan untuk membentuk *tax treaty*
- Untuk Indonesia, belum memiliki *tax treaty* dengan: Laos (*proses ratifikasi*), Myanmar (*proses tanda tangan*), dan Kamboja



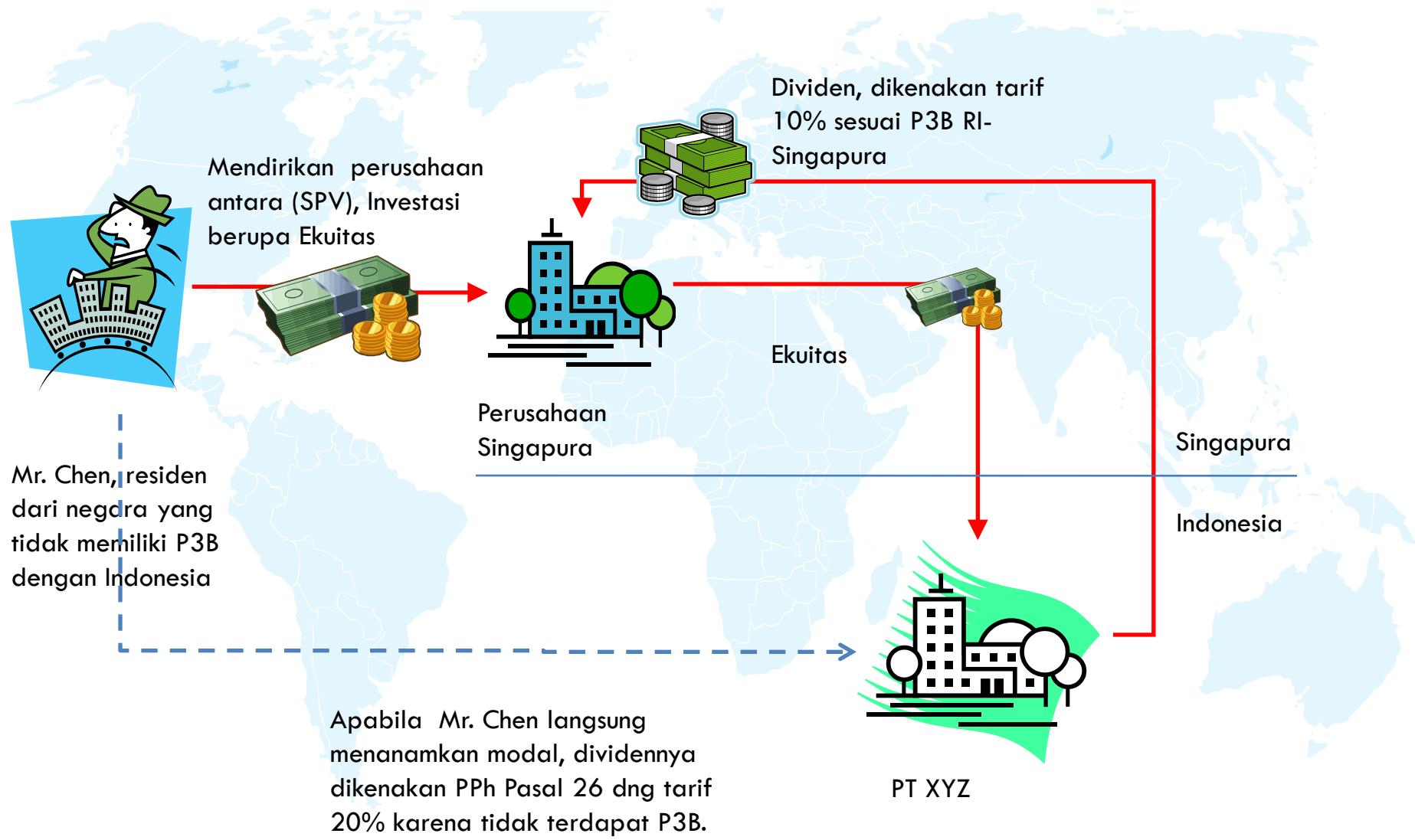
Issues of Discussion -Challenges- (2)

Upaya mencegah *double non-tax*

- Perbedaan sistem perpajakan, khususnya terkait ‘tarif’, ‘transparansi informasi perpajakan’, dan ‘syarat menjadi subjek pajak’, **berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan penghindaran pajak.**
- Dengan dalih kepentingan ekonomi dan kedaulatan negara, perspektif pencegahan penghindaran pajak sangat mungkin berbeda antara satu negara dengan yang lain.
- Kualifikasi untuk disebut sebagai “tindakan penghindaran pajak” bisa berbeda satu sama lain → berpotensi dimanfaatkan Wajib Pajak (*aggressive tax planning*)
- Contoh *common transaction* yang dapat dijadikan sarana penghindaran pajak: (i) *treaty shopping*, (ii) *no economic substance*, (iii) *transfer mis-pricing*, etc

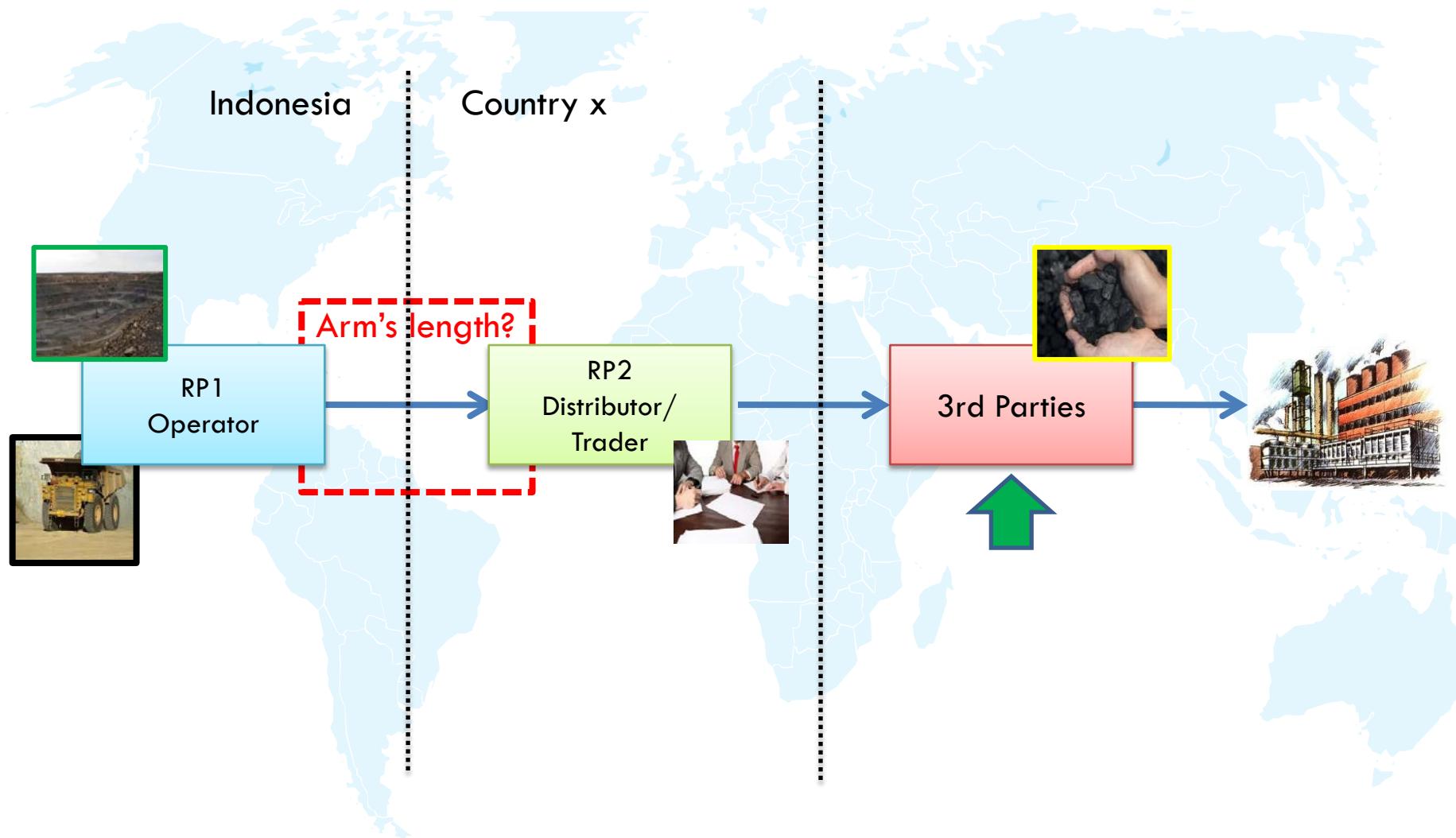


Transaksi Tanpa Substansi Ekonomi





Transaksi Lintas Batas





Issues of Discussion -Advantages-

**Kesiapan & Kepastian Regulasi
Perpajakan
di Indonesia**

**Partisipasi Aktif Indonesia dalam
Forum Internasional**

**Leadership Indonesia dalam
ASEAN dan Peran Sebagai Role
Model di Wilayah ASEAN**



Issues of Discussion -Advantages- (2)

Kesiapan dan Kepastian Regulasi

- terkait *anti tax avoidance*, dalam UU PPh-nya, Indonesia memiliki beberapa ketentuan *anti avoidance* yang bersifat spesifik, misal: **perbandingan utang dan modal, controlled foreign company** (\rightarrow mencegah penyembunyian penghasilan di LN), **anti treaty shopping**, dan **anti transfer mis-pricing**.
- dalam pemanfaatan *tax treaty*, regulasi saat ini (PER-61/2009 & PER/2009 dan perubahannya) memberi persyaratan baik secara administratif maupun substansi untuk **memastikan agar tax treaty tidak semata-mata dimanfaatkan untuk kepentingan pajak**
- dengan memperhatikan konsep *substance over form* (Pasal 4(1)), maka UU PPh sudah menyiratkan ketentuan umum tentang *anti tax avoidance*
- terkait insentif pajak, secara umum Indonesia mempunyai 2 rejim yaitu: (i) *tax holiday* dan (ii) *investment allowance*; yang diberikan secara ketat untuk memastikan agar insentif dimaksud berdaya guna untuk pertumbuhan ekonomi



Issues of Discussion -Advantages- (3)

Partisipasi Aktif dalam Forum Kerjasama Internasional

- jaringan *tax treaty* yang luas (64)
- terkait transparansi pertukaran informasi (*exchange of information* / EoI), terlibat aktif dalam G20 dan Global Forum-OECD untuk memastikan pencegahan upaya penghindaran pajak
- negara ASEAN yang terlibat dalam Global Forum: Indonesia, Malaysia dan Singapura
- terkait Project BEPS (*Base Erosion Profit Shifting*), Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang menjadi associate; **project BEPS bertujuan untuk memastikan pencegahan tax avoidance/evasion secara bersama-sama**

Role Model di ASEAN

- Direktorat Jenderal Pajak merupakan administrasi perpajakan yang paling besar di ASEAN
- dalam Forum ASEAN Tax Forum, Kementerian Keuangan memiliki peran signifikan dalam menentukan pola kebijakan fiskal secara regional



Simpulan

- Sebagai konsekuensi dari ekonomi ASEAN yang terintegrasi, administrasi perpajakan Indonesia harus mewaspadai potensi penghindaran pajak (avoidance/evasion)
- Ketentuan tentang *anti tax avoidance* perlu terus dievaluasi dan diperkuat dari masa ke masa
 - sebagai wacana, Indonesia perlu mengatur General Anti Avoidance Rules secara lebih tegas dalam UU PPh (*Purpose & Substance of Transaction*)
- Secara optimal, Indonesia harus memanfaatkan segala ‘advantages’ yang dimilikinya, untuk mendapatkan manfaat ekonomi tanpa kehilangan potensi basis pemajakannya



Selesai dan Terima Kasih